

Analisis Proses Sertifikasi *Sign On* dan *Sign Off* Awak Kapal di PT. Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Jakarta

Ima Rohimah¹, Syahron AL Rosyid^{2*}, & Diana Ayu Wulandari³

^{1&2} Program Studi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan, Akademi Maritim
Suaka Bahari Cirebon

³Program Studi Nautika, Akademi Maritim Suaka Bahari Cirebon

*e-mail: syahronalrosyid6@gmail.com

Abstract

The sign-on and sign-off certification process is a mandatory procedure to ensure that every seafarer boarding or disembarking a vessel meets the required qualifications, legal documentation, and safety standards in accordance with national and international regulations. This study aims to analyze the obstacles encountered in the certification process of sign-on and sign-off at PT. Salam Pacific Indonesia Lines Jakarta Branch, and to identify their impacts on the company's operational performance. The research employs a descriptive qualitative method through observation, interviews, and document analysis. The findings indicate several key obstacles, including expired maritime certificates and insufficient job qualifications, delays in issuing transfer letters from previous companies, invalid medical check-up results, and technical disruptions within the online certification system. These challenges lead to delays in crew rotation, disruption of voyage schedules, increased operational costs, potential administrative sanctions, and decreased service efficiency. This study emphasizes the importance of proactive document management, improved coordination among the company, seafarers, and port authorities, and the optimization of digital administrative services to accelerate certification processes. Strengthening crewing management procedures is expected to improve vessel operational efficiency and maintain compliance with maritime safety standards.

Keywords: *seafarer certification, sign on, sign off, Crew Management, Administrative Digitalization*

Abstrak

Proses sertifikasi sign on dan sign off merupakan prosedur wajib bagi setiap awak kapal untuk memastikan kelayakan kerja, legalitas dokumen, serta pemenuhan standar keselamatan sesuai regulasi nasional dan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang terjadi dalam proses sertifikasi sign on dan sign off awak kapal di PT. Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Jakarta serta mengidentifikasi dampaknya terhadap operasional perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa hambatan utama, di antaranya masa berlaku sertifikat pelaut yang telah kedaluwarsa, tidak terpenuhinya kualifikasi jabatan, belum terbitnya surat mutasi dari perusahaan sebelumnya, hasil medical check-up yang tidak valid, serta kendala teknis pada sistem penyijilan berbasis daring. Hambatan tersebut berdampak pada keterlambatan rotasi awak kapal, ketidaktepatan jadwal keberangkatan, meningkatnya biaya operasional, risiko sanksi administrasi, serta menurunnya kinerja layanan perusahaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengelolaan dokumen pelaut secara proaktif, peningkatan koordinasi antara perusahaan, pelaut, dan pihak syahbandar, serta digitalisasi layanan administrasi untuk mempercepat proses sertifikasi. Optimalisasi manajemen crewing diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasi kapal dan menjaga standar keselamatan pelayaran.

Kata Kunci: *Sertifikasi pelaut, sign on, sign off, Manajemen Crewing, Digitalisasi Administrasi*

PENDAHULUAN

Industri pelayaran merupakan sektor yang sangat bergantung pada pemenuhan regulasi keselamatan dan standar kompetensi awak kapal untuk menjamin keselamatan pelayaran, kontinuitas layanan logistik dan kepercayaan pemangku kepentingan. Salah satu prosedur penting dalam pengelolaan awak kapal adalah proses sertifikasi *sign on* dan *sign off*, yaitu pengesahan resmi bahwa seorang pelaut telah memenuhi persyaratan administrasi, kompetensi, serta kesehatan untuk bergabung atau turun dari kapal. Proses ini diatur dalam berbagai ketentuan nasional, seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan regulasi Kementerian Perhubungan, serta ketentuan internasional seperti *Standards of Training, Certification, and Watchkeeping (STCW)* dan *Maritime Labour Convention (MLC 2006)* (International Maritime Organization, 2010).

Dalam praktiknya, pelaksanaan sertifikasi *sign on* dan *sign off* seringkali menghadapi kendala administratif, teknis, dan operasional. Ketika dokumen pelaut tidak lengkap atau masa berlaku sertifikat telah kedaluwarsa, hasilnya tidak sekadar “administrasi tertunda”, namun dokumen yang tidak valid langsung mencegah seorang awak kapal untuk bergabung atau turun, sehingga rotasi crew tertunda (Nisa, S., Dahri, M., Yudianto, P. Y., & Rakhman, 2025). Penundaan rotasi ini memaksa kapal menunda keberangkatan atau melakukan perubahan manifest mendadak, yang pada gilirannya meningkatkan biaya bahan bakar (karena waktu menunggu), memicu pembayaran lembur dan kompensasi awak, serta berpotensi menyebabkan denda karena melanggar jadwal pelayaran atau kontrak pengangkutan.

Gangguan pada layanan penyijilan daring atau ketidaksesuaian hasil medical *check-up* sama-sama menghasilkan efek domino dari kebutuhan verifikasi manual yang memakan waktu, penjadwalan ulang pelatihan atau pemeriksaan kesehatan, hingga penurunan efektivitas operasional dan keandalan layanan perusahaan (Aditya Pangestu & Erliyana, 2022).

Penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa kesalahan administrasi dokumen dan keterbatasan sistem penyijilan digital berkontribusi signifikan terhadap keterlambatan rotasi crew dan kenaikan biaya operasional pelayaran. (Amanto, A., Bintari, P. N., & Setyawan, 2023). Selain itu, aspek pelatihan non teknis dan kesiapan organisasi juga memengaruhi efektivitas proses sertifikasi serta kemampuan merespons gangguan operasional (Dona et al., 2024). Studi mengenai peran agen crewing dan integrasi sistem digital menyoroti potensi solusi, tetapi juga mencatat bahwa implementasi pada level cabang sering kurang matang dan menjadi titik kegagalan operasional (Anshori et al., 2025).

Faktor non teknis memperburuk efek tersebut apabila organisasi cabang tidak siap merespons. Ketiadaan SOP eskalasi cepat, keterbatasan kapasitas staf crewing, atau jalur komunikasi yang lemah antara cabang dan kantor pusat mengubah masalah dokumen yang seharusnya dapat diselesaikan dalam jam menjadi delay berhari-hari. Dalam situasi seperti itu, biaya operasional meningkat secara langsung (biaya lembur, biaya pelabuhan, denda kontraktual), sementara efektivitas armada menurun karena kapal kehilangan slot operasional dan jadwal pengiriman menjadi tidak dapat diandalkan (Dewi, S. M., Fifaldyovan, M. I., & Juniarti, 2025).

PT. Salam Pacific Indonesia Lines sebagai salah satu perusahaan pelayaran nasional yang besar, bergantung pada pengelolaan awak kapal yang efektif untuk menjaga ketepatan waktu dan kelancaran operasional. Namun, Cabang Jakarta masih menghadapi berbagai kendala dalam proses sertifikasi tersebut, yang berdampak pada efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan pelayaran.

Cabang Jakarta, sebagai salah satu titik operasional utama perusahaan, menghadapi berbagai kendala dalam proses sertifikasi *sign on* dan *sign off* yang bersifat administratif, teknis, dan organisasi. Contoh konkrit yang sering terjadi di lapangan meliputi dokumen pelaut yang tidak lengkap atau sudah kedaluwarsa menjelang keberangkatan, gangguan layanan

penyijilan daring yang menuntut verifikasi manual, serta keterbatasan kapasitas staf crewing dalam menangani lonjakan kasus simultan. Akibatnya, masalah yang awalnya sederhana dapat mengakumulasi menjadi keterlambatan berjamah-jam hingga berhari-hari, memaksa manajemen mengeluarkan biaya tak terencana (lembur, biaya pelabuhan tambahan, penyesuaian jadwal kapal), sekaligus meningkatkan risiko non-kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internasional yang berpotensi menimbulkan sanksi administratif atau pembatasan operasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hambatan yang terjadi dalam proses sertifikasi *sign on* dan *sign off* di Cabang Jakarta serta menilai dampaknya terhadap kinerja operasional PT. Salam Pacific Indonesia Lines. Secara khusus penelitian bertujuan: (1) mengidentifikasi jenis hambatan (administratif, teknis, organisasi) dan titik kegagalan proses; (2) memetakan efek langsung dan tidak langsung hambatan tersebut terhadap indikator operasional seperti on-time departure dan biaya operasional; serta (3) merumuskan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas manajemen crewing dan memperkuat sistem sertifikasi meliputi perbaikan SOP, peningkatan kapabilitas staf, dan opsi integrasi teknologi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan efektivitas manajemen *crewing* dan penguatan sistem sertifikasi awak kapal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis hambatan yang terjadi dalam proses sertifikasi *sign on* dan *sign off* awak kapal di PT. Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Jakarta. Penelitian dilaksanakan di lokasi perusahaan selama periode Agustus 2024 hingga Februari 2025, melibatkan *staf crewing*, mentor lapangan, manajemen nautikal, serta pelaut yang sedang menjalani proses sertifikasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses administrasi dan penyijilan, wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta dokumentasi berbagai dokumen pelaut seperti sertifikat, buku pelaut, dan Perjanjian Kerja Laut (PKL). Selain itu, studi pustaka digunakan untuk memperkuat analisis melalui regulasi resmi dan literatur kepelautan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan lapangan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hambatan serta dampaknya terhadap operasional perusahaan (Rijali, 2019).

Selain itu, pada penelitian ini diterapkan triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu secara sistematis untuk memperkuat validitas temuan (Susanto, D., & Jailani, 2023). Untuk triangulasi sumber, data dikumpulkan dari beberapa kelompok informan seperti pelaut yang mengalami proses *sign on* atau *sign off*, staf unit crewing di cabang, serta manajemen operasional dan kepatuhan di kantor pusat, sehingga setiap isu dapat dilihat dari perspektif aktor yang berbeda. Informan dipilih secara purposive untuk memastikan keterwakilan peran dan pengalaman yang relevan, perbedaan jawaban antar kelompok dibandingkan menggunakan matriks triangulasi yang mencatat tema utama, sumber yang mengonfirmasi, serta sumber yang bertentangan.

Triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan observasi lapangan (proses verifikasi dokumen dan alur kerja di kantor cabang), wawancara semi-struktural mendalam (fokus pada penyebab hambatan dan mekanisme penanganan), serta studi dokumen (copy sertifikat, *checklist sign on* atau *sign off*, log kehadiran, dan catatan komunikasi elektronik). Setiap data lapangan didokumentasikan melalui catatan lapangan terstruktur, rekaman (dengan izin), dan salinan dokumen, lalu dianalisis secara tematik agar bukti dari berbagai metode dapat saling melengkapi atau menguji konsistensi temuan.

Triangulasi waktu dan prosedur verifikasi tambahan meningkatkan kredibilitas dan dependabilitas hasil. Triangulasi waktu dilaksanakan dengan melakukan pengamatan dan

pengumpulan data pada beberapa momen proses sertifikasi (pra-keberangkatan, saat verifikasi administrasi, dan pasca *sign on* atau *sign off*) untuk menangkap variasi proses dan hambatan yang bersifat insidental maupun berulang.

Setelah analisis awal, peneliti melakukan *member check* dengan mengirimkan ringkasan temuan dan interpretasi kepada beberapa informan kunci dari tiap kelompok untuk meminta klarifikasi, koreksi, dan konfirmasi proses ini dicatat (siapa yang diverifikasi, tanggal, dan perubahan yang disarankan) sebagai bagian dari audit trail. Seluruh langkah dilengkapi dengan prosedur etika (informed consent, anonimisasi data, dan penyimpanan aman), serta dokumentasi langkah-langkah analitis (kode tematik, contoh kutipan, dan keputusan penelitian) untuk meningkatkan transferabilitas dan memungkinkan peneliti lain menilai dependabilitas temuan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan sertifikasi *sign on* dan *sign off* dalam industri pelayaran merupakan komponen krusial dalam sistem manajemen sumber daya maritim karena berkaitan dengan pemenuhan persyaratan legalitas kerja, keselamatan pelayaran, dan standar kompetensi profesi pelaut. Regulasi internasional seperti *Standards of Training, Certification, and Watchkeeping (STCW)* serta aturan nasional mensyaratkan bahwa setiap awak kapal harus memiliki dokumen yang sah dan valid sebelum menjalankan aktivitas operasional. Dengan demikian, proses sertifikasi bukan hanya prosedur administratif, tetapi mekanisme kontrol risiko yang bertujuan memastikan bahwa setiap individu yang bertugas telah memenuhi aspek kesehatan, kompetensi teknis, dan kualifikasi jabatan. Apabila proses sertifikasi berjalan sesuai ketentuan, maka operasional kapal dapat dilaksanakan secara aman, terstruktur, dan sesuai jadwal. Sebaliknya, apabila terjadi hambatan administratif, teknis, atau personal, maka sistem pelayaran akan menghadapi gangguan yang berpotensi memengaruhi jadwal keberangkatan, kinerja logistik, hingga kepatuhan terhadap regulasi. Oleh sebab itu, efektivitas dan ketepatan waktu dalam proses sertifikasi menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola awak kapal pada perusahaan pelayaran.

Gambaran Umum Proses Sertifikasi *Sign On* dan *Sign Off* di PT. Salam Pacific Indonesia

Lines Cabang Jakarta

Proses sertifikasi *sign on* dan *sign off* di PT. Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Jakarta merupakan prosedur penting yang bertujuan memastikan setiap awak kapal memenuhi persyaratan legal, kompetensi, dan kesehatan sebelum bekerja atau menyelesaikan masa kerja. Proses tersebut dilakukan melalui sistem daring resmi dokumen pelaut.dephub.go.id dan diverifikasi oleh staf crewing perusahaan yang memeriksa kelengkapan dokumen seperti PKL, buku pelaut, sertifikat keahlian, serta hasil MCU. Setelah itu, dokumen diserahkan kepada Syahbandar untuk divalidasi dan disahkan sebelum crew dapat naik atau turun kapal. Keberhasilan proses ini sangat menentukan kelancaran operasional kapal karena tanpa sertifikasi yang sah, kapal tidak diperbolehkan berlayar.

Hambatan dalam Proses Sertifikasi *Sign On*

Hambatan dalam proses sertifikasi *sign on* sering terjadi akibat kelalaian crew dalam mengelola dokumen pribadi, khususnya sertifikat pelaut yang sudah kedaluwarsa atau belum direvalidasi. Selain itu, banyak ditemukan ketidaksesuaian data pada PKL, buku pelaut, dan crew list yang menyebabkan dokumen ditolak oleh Syahbandar dan memerlukan perbaikan ulang. Hambatan teknis berupa gangguan sistem online seperti error 505, kesulitan unggah file, atau server yang lambat juga memperlambat proses penyijilan. Tidak jarang crew yang

datang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan, sehingga proses sign on harus ditunda sampai crew yang kompeten tersedia. Masalah lain muncul dari hasil MCU yang tidak memenuhi standar keselamatan kerja laut sehingga crew dinyatakan tidak layak berlayar. Seluruh hambatan ini berdampak langsung pada keterlambatan penyelesaian administrasi *sign on*.

Hambatan dalam Proses Sertifikasi *Sign Off*

Proses sertifikasi *sign off* juga tidak luput dari kendala, terutama ketika *crew* tidak membawa atau tidak memiliki surat mutasi off yang dikeluarkan perusahaan sebelumnya. Ketidaksihambatan yang cukup sering terjadi, sehingga data harus dikonfirmasi ulang sebelum disahkan oleh Syahbandar. Selain itu, terdapat kasus *crew* yang tidak menyelesaikan masa kontraknya sehingga memerlukan klarifikasi tambahan dan memperlambat proses *sign off*. Hambatan lainnya muncul akibat pelanggaran disiplin selama berada di atas kapal, seperti perselisihan atau pelanggaran SOP, yang mengharuskan adanya laporan tambahan sebelum penyijilan dapat dilakukan. Hal-hal tersebut membuat proses *sign off* menjadi lebih lama dan mengganggu kelancaran pergantian *crew*.

Dampak Hambatan Terhadap Operasional Perusahaan

Hambatan dalam proses sertifikasi *sign on* maupun *sign off* memiliki dampak signifikan terhadap operasional perusahaan, terutama ketika kapal tidak dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena dokumen *crew* belum disahkan. Kondisi ini meningkatkan biaya operasional, seperti biaya penginapan *crew* yang tertunda, biaya overtime staf, dan risiko denda akibat keterlambatan distribusi barang kepada pelanggan. Penundaan *sign off* juga menyebabkan penurunan moral *crew* yang seharusnya sudah menyelesaikan kontrak namun terpaksa bekerja lebih lama. Selain itu, perusahaan berisiko mendapatkan sanksi dari otoritas pelabuhan apabila kapal beroperasi tanpa kelengkapan dokumen yang sah. Bila hambatan ini terjadi berulang, reputasi perusahaan dapat menurun karena pelanggan menganggap layanan tidak konsisten dan tidak tepat waktu.

Upaya PT. Salam Pacific Indonesia Lines dalam Mengatasi Hambatan

Untuk mengatasi hambatan dalam proses penyijilan, PT Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Jakarta melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari peningkatan monitoring masa berlaku sertifikat melalui database internal, hingga melakukan pengawasan administratif yang lebih ketat terhadap dokumen *crew* sebelum diajukan ke Syahbandar. Perusahaan juga meningkatkan koordinasi dengan Syahbandar agar proses validasi dapat dipercepat, terutama ketika menghadapi hambatan teknis pada sistem online. Selain itu, PT. Salam Pacific Indonesia Lines menerapkan digitalisasi administrasi crewing guna mempercepat proses input data dan meminimalisir kesalahan pengisian. Pembekalan dan pelatihan diberikan kepada crew untuk meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban pengelolaan dokumen, sementara penyediaan fasilitas mess membantu memastikan *crew* siap secara administratif dan kesehatan sebelum diberangkatkan.

Secara keseluruhan, proses sertifikasi *sign on* dan *sign off* di PT. Salam Pacific Indonesia Lines telah mengikuti standar regulasi nasional dan internasional, namun hambatan teknis dan administratif masih sering muncul dan berdampak langsung pada operasional perusahaan. Hambatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan crew, kompleksitas birokrasi antarinstansi, dan gangguan pada sistem online pemerintah. Dengan memperkuat SOP internal, meningkatkan pemanfaatan teknologi, serta membangun komunikasi yang lebih intensif antara *crew*, perusahaan, dan otoritas pelabuhan, proses

penyijilan dapat berjalan lebih efektif dan efisien sehingga mendukung kelancaran aktivitas pelayaran.

Dengan demikian, sinkronisasi antar komponen sistem dan pelaku administrasi menjadi syarat utama untuk memastikan proses sertifikasi berjalan optimal. Jika seluruh hambatan berhasil diminimalkan melalui penguatan manajemen dokumen, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan koordinasi lintas lembaga, maka proses sertifikasi tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga instrumen yang mendukung efektivitas operasional serta profesionalitas awak kapal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses sertifikasi *sign on* dan *sign off* awak kapal di PT. Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Jakarta, dapat disimpulkan bahwa proses penyijilan merupakan tahap yang sangat penting untuk menjamin legalitas, kompetensi, dan keselamatan kerja awak kapal sebelum memulai maupun mengakhiri masa kerja. Secara umum, prosedur yang diterapkan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan regulasi pemerintah seperti STCW 2010, MLC 2006, dan peraturan Dirjen Perhubungan Laut. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan administratif, teknis, maupun personal yang mempengaruhi kelancaran proses sertifikasi.

Hambatan utama dalam proses *sign on* meliputi sertifikat pelaut yang kedaluwarsa, ketidaksesuaian data pada dokumen, gangguan pada sistem online, kualifikasi crew yang tidak sesuai, serta hasil MCU yang tidak memenuhi syarat. Sementara itu, proses *sign off* sering terkendala oleh ketidaksesuaian dokumen mutasi, crew yang tidak menyelesaikan kontrak, serta pelanggaran disiplin di atas kapal. Hambatan-hambatan tersebut menimbulkan dampak signifikan terhadap operasional perusahaan, seperti keterlambatan keberangkatan kapal, bertambahnya biaya operasional, menurunnya motivasi crew, hingga potensi sanksi hukum jika kapal beroperasi tanpa dokumen sah.

PT. Salam Pacific Indonesia Lines Cabang Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut melalui peningkatan monitoring dokumen, digitalisasi administrasi, pembinaan *crew*, serta penguatan koordinasi dengan Syahbandar. Meski demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sertifikasi akan berjalan lebih efektif dan efisien apabila perusahaan terus memperkuat SOP internal, memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta meningkatkan kedisiplinan *crew* dalam mengelola dokumen pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Pangestu, R., & Erliyana, S. (2022). Pelayanan Keagenan Pt Serunting Sriwijaya Cabang Batang Dalam Menangani Sijil Crew Kapal Tb Setia Makmur. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 24(1), 44–48. <https://doi.org/10.37612/gema-maritim.v24i1.277>
- Amanto, A., Bintari, P. N., & Setyawan, Y. (2023). *View of Analisis keterlambatan pergantian awak kapal di PT Samudera Daya Maritim*.
- Anshori, D. F. R., Rahayu, T., Puspitacandri, A., & Dahri, M. (2025). Peran Strategis Agen Crewing dalam Mendukung Operasional Pelayaran. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 3070–3074. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.976>
- Dewi, S. M., Fifaldyovan, M. I., & Juniarti, K. (2025). Menelusuri Demurrage: evaluasi Operasional dan Administratif Dalam Keterlambatan Bongkar Muat Kapal di Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera, Cilegon Banten (Studi Kasus Pada Kapal MV Hui Kang Hai). *MUARA: Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional Vol.*, 8(1), 25–36.
- Dona, R., Sukahir, Parjan, Yuniar, D., & Kurniawan, D. (2024). Journal of Engineering and Transportation. *Journal of Engineering and Transportation*, 2(1), 1–16.

- International Maritime Organization. (2010). *International Convention on Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers (STCW) – Amendments 2010*. IMO Publishing.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Nisa, S., Dahri, M., Yudianto, P. Y., & Rakhman, R. A. (2025). Analisis Mekanisme Pergantian Crew Kapal Terhadap Ketentuan Safe Manning Di Pt. Taraka Samudra Sejahtera. *Jurnal Baruna Horizon*, 7(2), 103–114. <https://doi.org/10.52310/jbhorizon.v7i2.177>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>